

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi

Magdalena Nona Ice^{1*}, Lilis Ardini², Kurnia³

¹⁾Prodi Akuntansi, Universitas Nusa Nipa Maumere

^{2,3)}Pascasarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya

¹⁾magdalenanona4@gmail.com, ²⁾lilisardini@stiesia.ac.id, ³⁾kurnia@stiesia.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 27 Juli 2023

Disetujui : 2 Agustus 2023

Dipublikasi : 1 Oktober 2023

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the influence of competence, internal system control, and community participation on the accountability of village financial management, moderated by the use of information technology. The type of data used in the study was primary data obtained from questionnaires that were distributed directly to respondents, namely village heads, secretaries, treasurers, BPD, and communities within the Sikka Regency village government. Sampling through Purposive sampling and obtained a sample of 150 respondents. Data analysis was processed using SPSS through a statistical method of multiple regression with a moderation approach, namely Moderated Regression Analysis (MRA). The results of the analysis show that competence and internal control systems have a positive and significant effect, while community participation does not affect the accountability of village financial management. The use of information technology does not moderate the influence of competence, internal system control, and community participation on the accountability of village financial management. The implications of this research, especially for village officials in Sikka Regency, are expected to be better in accountability for managing villages finances, provide input to the Sikka district, so that in the future the village financial system application can be fully used in this area and can simplifying the village bookkeeping and spending system. In addition, village officials are also expected to be able to involve the village community in all decision-making related to the interests and prodrress of the village and society in general.

Keywords: Village Financial Management Accountability, Competence, Internal Control System, Community Participation, IT Utilization

PENDAHULUAN

Menurut Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan desa dalam hal ini, mencakup empat bidang pembangunan dan difokuskan pada keempat lingkup pembangunan tersebut yang menegaskan esensi dari undang-undang desa yakni memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk tidak hanya dijadikan objek pembangunan tetapi lebih mandiri menjadi objek sekaligus subjek pembangunan. Dengan demikian desa tersebut dapat melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan desa itu sendiri.

Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Akuntabilitas merupakan kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Adapun beberapa masalah yang masih menjadi perhatian khusus dalam lingkup akuntansi pemerintahan adalah terkait pengelolaan dana desa, yaitu tingginya tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang segera mungkin harus menjadi fokus pembenahan bagi aparatur desa. Banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, salah satunya kompetensi aparatur desa. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat penting agar nantinya dapat menerapkan prinsip akuntabilitas. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sikka yakni masih banyak aparat desa yang berpendidikan SMA sederajat. Hal ini sejalan dengan penelitian Atiningsih & Ningtyas (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas harus diimbangi dengan kemampuan perangkat desa dalam mengelola suatu anggaran karena dengan adanya kompetensi yang memadai maka akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama & Novita (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain kompetensi yang baik, pengelolaan dana desa juga memerlukan adanya sistem pengendalian internal. Dengan adanya sistem pengendalian internal dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sikka yakni sistem pengendalian desa masih rendah yang menyebabkan banyak desa-desa dalam pelaporan pertanggungjawaban setiap tahun tidak tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Yudiantoro (2017) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian Atiningsih & Ningtyas (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya pengendalian internal yang baik pada sebuah instansi tetapi tidak diimbangi dengan kerjasama antar aparatur pemerintah maka instansi tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dari organisasi. Kesuksesan suatu pengelolaan dana desa juga dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, dalam hal ini partisipasi masyarakat diperlukan untuk menggali potensi yang dimiliki sebuah desa dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan pembangunan di dalam lingkup desa. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sikka yakni minimnya keterlibatan dari masyarakat dalam kegiatan yang diadakan oleh desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Atiningsih & Ningtyas, (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat membantu berbagai kegiatan desa dengan mengikut sertakan masyarakat dalam segala proses penetapan kebijakan maupun anggaran pemerintah sebagai wujud pengendalian terhadap pihak manajemen. Namun, penelitian Listyawati *et al.*, (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah pembuatan suatu aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pemerintah dalam mengembangkan SISKEUDES bertujuan untuk membantu pemerintah desa agar lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa. Aplikasi siskeudes relatif mudah digunakan untuk mengakomodir dan menjawab kebutuhan administrasi dan penatausahaan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Permasalahan terkait penerapan Siskeudes tersebut tentunya menjadi masalah bagi masyarakat desa yang belum terbiasa menggunakan komputer sebagai alat dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa tersebut. Selain itu juga permasalahan yang terjadi terkait aplikasi Siskeudes adalah berkaitan dengan ketersediaan jaringan internet yang belum mampu mengakses topografi desa yang masih terpencil sehingga menyebabkan belum adanya pemerataan penggunaan aplikasi Siskeudes. Pelatihan penggunaan aplikasi yang dijanjikan secara berkala oleh pemerintah pusat juga apakah sudah sesuai dengan rencana tersebut dan telah diikuti oleh semua elemen desa hingga ke desa dengan letak topografi desa yang ekstrem atau susah untuk diakses.

Stewardship theory mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sector publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik dan dapat mempertanggungjawabkan dana desa yang diamanahkan kepadanya, sehingga visi dan misi yang direncanakan dapat dicapai secara maksimal. Tetapi dalam pelaksanaannya aparat desa (steward) masih mempunyai beberapa kelemahan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut yaitu pertama berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang bersifat akuntabel. Kedua penggunaan teknologi informasi pada bidang pemerintahan yang cukup membantu masyarakat dalam hal pelayanan publik. Penggunaan teknologi informasi yang dimaksudkan adalah penerapan aplikasi SISKEUDES tetapi pada kenyataannya banyak aparat desa yang tidak memahami penggunaan teknologi informasi dalam hal ini SISKEUDES sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan administrative maupun substantive dalam pengelolaan keuangan desa. Teori ini menjadi landasan dari penelitian ini yang dapat menjelaskan bahwa masyarakat desa sebagai principal yang mempercayakan pemerintah desa sebagai steward untuk mengelola dana desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa melalui pembangunan desa.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut terdapat beberapa penelitian yang relevan yang telah dilakukan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yakni oleh Rezkiyanti, (2019) mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil Penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Pahlawan et al., (2020) mengenai Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Enggar. Hasil Penelitian menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian lain juga dilakukan oleh Yustika (2019) mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil Penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Marlon Reu & Lasdi (2021), Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan partisipasi masyarakat desa dan penerapan SISKEUDES tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam wilayah Kecamatan Tanawawo. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang masih inkonsisten, maka penulis ingin meneliti kembali dengan menghadirkan variabel moderasi yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini dilakukan untuk memantapkan hasil penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sikka. Faktor terpenting di pemerintahan desa yaitu perangkat desa dan kepala desa yang merupakan sumber daya manusia yang tersusun dalam struktur organisasi desa. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan akan memberi pengaruh terhadap kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan untuk kemajuan desa. Diharapkan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan memperkuat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi semakin baik.

STUDI LITERATUR

Teori *Stewardship* (*stewardship Theory*)

Teori *stewardship* menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai tujuan dari kepentingan masyarakatnya (Donaldson dan Davis, 1991). Selain itu, pemerintah juga melakukan pekerjaannya atas motivasi kepentingan organisasi dan bukan termotivasi dari kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1991). Implikasi teori *stewardship* dalam

penelitian ini yaitu *stewards* (aparatur desa) diharapkan akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan *principal* yaitu masyarakat dan instansi mereka sehingga dapat dipercaya dalam bertindak yang sesuai dengan kepentingan publik yaitu dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, merencanakan dan melaksanakan anggaran yang diamanahkan kepadanya. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* diharapkan mengerahkan semua kemampuan dan keahlian dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntabilitas yang baik ditunjukkan oleh adanya sistem akuntansi yang dapat memberikan informasi handal, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat waktu (Lestari et al., 2019).

Kompetensi

Menurut Sutrisno (2017:2), sumber daya manusia yang andal di dalam organisasi dibentuk sejak tahap seleksi hingga tahap pelaksanaan tugas karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Terkait pengelolaan dana desa, seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa tersebut karena aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut, dan begitu pula sebaliknya (Umaira dan Adnan, 2019).

Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Atiningsih dan Ningtyas (2019), partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat, dimana partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat karena tanpa adanya partisipasi masyarakat di setiap kegiatan maka pembangunan desa tidak akan tercapai dengan baik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan kumpulan dari beberapa unsur teknologi seperti komputer, perangkat (*hardware* dan *software*), database, jaringan, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Yudianto dan Sugiarti, 2017). Teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi.

HIPOTESIS

H1: Kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kompetensi diyakini sebagai salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dimana semakin kompeten seseorang aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka akan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Terkait pengelolaan dana desa,

maka seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk dapat mengelola dan bertanggungjawabkan dana desa. Jika aparatur desa berkompeten dalam mengelola keuangan desa maka hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya, jika aparatur desa tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka akuntabilitas tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Umaira dan Adnan, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian Budiana et al. (2019), Atiningsih dan Ningtyas (2019), Aulia et al. (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa maupun kompetensi aparatur pengelola dana desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

SPIP atau sistem pengendalian internal pemerintah adalah suatu alat pengendalian sistem internal yang dilaksanakan pada semua lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian tertuang dalam PP No.60 tahun 2008. SPI adalah suatu bentuk kontrol dan pengawasan yang dilakukan dengan tujuan meminimalisir adanya kesalahan dalam pelaksanaan fungsi serta tanggungjawab organisasi seperti kecurangan dan penyelewengan aset negara. Dengan demikian, sistem pengendalian internal dalam mengelola dana desa sangat diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Jika pengendalian internal suatu pemerintah lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan kecil. Hal ini didukung dengan penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019), Budiana *et al.* (2019), dan Widyatama *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Partisipasi Masyarakat adalah hal yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat (Perdana, 2018). Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting karena masyarakat dapat memperoleh informasi tentang penyaluran dana untuk pembangunan desanya. Masyarakat bisa disebut juga pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan kebijakan organisasi publik, terutama implementasi pembangunan di desa-desa. Implementasi pembangunan harus diprioritaskan dengan melibatkan masyarakat sehingga proses implementasi pembangunan tepat pada sasaran, efisien dan efektif (Wafirotin dan Septiviastuti, 2019). Hal ini didukung oleh penelitian Atiningsih dan Ningtyas (2019), Aulia *et al.* (2018), Umaira dan Adnan (2019), dan Wafirotin dan Septiviastuti (2019) menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

H4 : Pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Di era yang serba modern saat ini serta tuntutan pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan desa yang semakin tinggi, aparatur desa selaku agen tentunya memerlukan sebuah alat atau sistem yang dapat membantu dalam rangkaian pekerjaan aparatur desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, BPKP menciptakan sebuah sistem berupa aplikasi yang diyakini dapat membantu pengelolaan dana desa yaitu aplikasi Siskeudes. Hubungan antara *stewardship theory* dengan aplikasi SIKEUDES, dapat dilihat dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dimana dengan adanya aplikasi SISKEUDES, agen diwajibkan untuk mampu menyajikan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan (Na'fiah, 2018) tentang Implementasi dan Evaluasi Siskeudes. Hasilnya menunjukkan bahwa kendala utama implementasi Siskeudes yang dirasakan oleh desa berkaitan

dengan SDM desa evaluasi dari implementasi Siskeudes adalah diperlukan sinergi dari SDM, baik SDM di desa maupun SDM di BPKP sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas yang diharapkan. (Sari, 2009) menyatakan efektivitas pemanfaatan SIA pada suatu organisasi tercermin dari kemampuan SDM dalam menggunakan komputer, semakin baik kompeten serta mahirnya seorang karyawan menggunakan komputer.

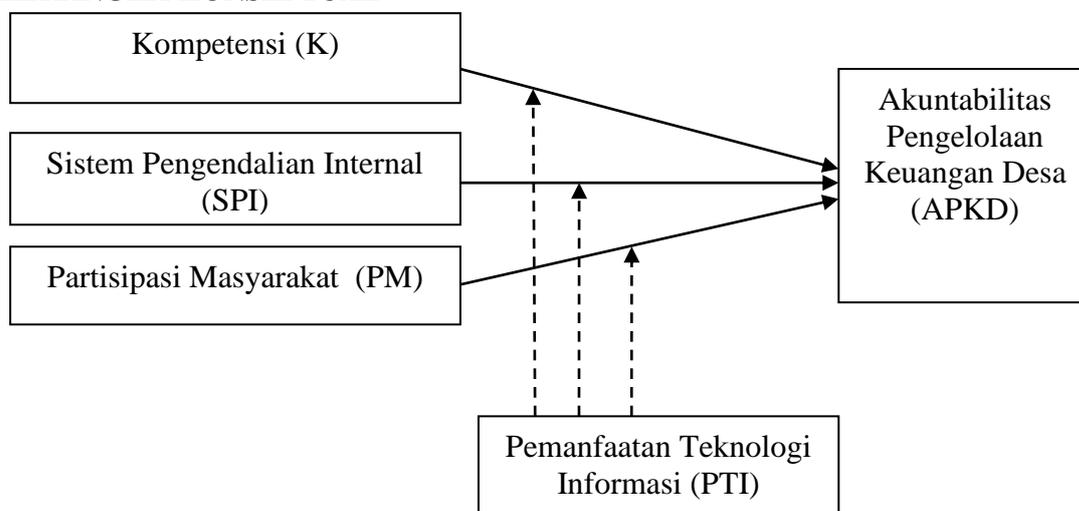
H5: Pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Menurut (Wiguna,2016) pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap individu dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan memberikan manfaat bagi pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan kemudahan dalam memeriksa ketelitian dan kebenaran data, sehingga dapat memberikan keyakinan dalam mempertanggungjawabkan pelaporan pada pemberi amanah. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan Aulia, (2018) mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh suhendro, *et al* (2020), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

H₆ : Pemanfaatan Teknologi Informasi memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Masyarakat dilibatkan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan kontrol. Masyarakat juga melakukan peran pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dengan tujuan melakukan tekanan dan tuntutan agar pengelolaan dana desa dapat digunakan dengan baik. Akuntabilitas akan tercapai jika adanya partisipasi dari masyarakat yang menyampaikan segala aspirasi serta berkontribusi dalam proses pengelolaan dana yang diperoleh. Berdasarkan asas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara partisipatif, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewi dan Gayatri (2019), Perdana (2018) dan Mada, *et al.*, (2017). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mudarosatun, (2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa dikarenakan masyarakat belum begitu paham mengenai alokasi dana desa, masyarakat hanya sekedar mengikuti apa yang di intruksikan tanpa mengetahui berapa besar dana desa yang diperoleh serta kegunaannya.

KERANGKA KONSEPTUAL



Gambar 1 KerangkaKonseptual

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan oleh peneliti yakni seluruh desa yang berada di kabupaten sikka dengan responden yakni para kepala desa, sekretaris, bendahara, BPD, dan masyarakat. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dan purposive sampling pengambilan sampel dengan memakai kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria yang digunakan peneliti adalah aparatur desa yang memiliki pengalaman bekerja minimal 3 tahun, tingkat pendidikan responden minimal SMA, desa yang sudah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) menggunakan dana desa tahun 2021. Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 desa dengan jumlah responden sebanyak 150 orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui survey kuesioner kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan Moderated Regression Analysis.

HASIL

Uji Validitas

Uji validitas juga dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skors masing-masing skor butir pernyataan menunjukkan hasil yang signifikan, maka masing-masing butir pertanyaan dikatakan valid. Tingkat validitas dalam penelitian ini dapat diukur menggunakan metode *product momen pearson*. Nilai korelasi antar skor butir pernyataan dengan total skor butir pernyataan dibandingkan dengan $r_{kritis}(0,30)$, maka instrument tersebut dikatakan valid dan berada pada tingkat validitas dengan tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2018: 51). Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen pernyataan memiliki koefisien korelasi lebih besar dari 0,30 sehingga dapat dijelaskan bahwa seluruh indikator variabel dalam penelitian ini adalah valid.

Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2018:45) Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur indicator variable atau konstruk dari suatu kuesioner. Suatu kuesioner reliable atau handal jika jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai cronach alpha dari masing-masing instrument dalam suatu variabel. Suatu variable akan dikatakan reliable apabila memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh indicator variable menunjukkan nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,70, sehingga dapat dijelaskan bahwa seluruh indicator variable dalam penelitian ini adalah reliable dan layak digunakan sebagai instrument penelitian.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen keduanya memiliki distribusi normal dan mendekati normal. Dalam uji normalitas penelitian ini, alat uji yang digunakan adalah uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z*. Nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* yang digunakan adalah 0,05. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal, sedangkan jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Data

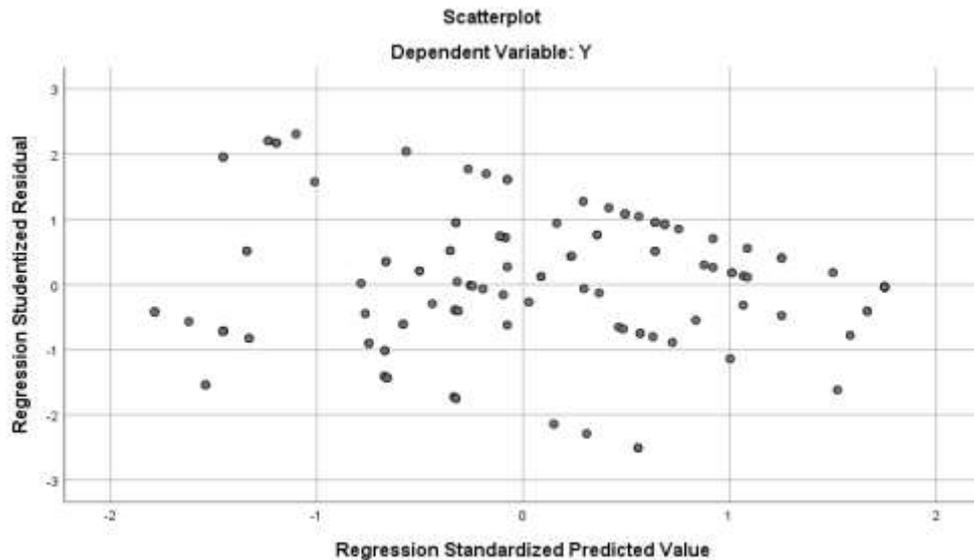
	<i>Unstandardized Residual</i>
N	135
<i>Kolmogorov- Smirnov Z</i>	0,57
<i>Asymp.sig. (2-tailed)</i>	0,200

Sumber: Hasil Output SPSS diolah, 2022

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas data, dapat diketahui bahwa dilihat dari nilai *Asymp.sig. (2-tailed)* 0,200 > 0,05, sehingga data yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Heterokedastisitas

Metode yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah melalui pola *scatterplot*. *Scatterplot* merupakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).



Uji Multikolinearitas

Tabel 17 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kompetensi	0,953	1.049	Bebas Multikolinearitas
Sistem Pengendalian Internal	0,648	1.543	Bebas Multikolinearitas
Partisipasi Masyarakat	0,643	1.554	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil Output SPSS diolah, 2022

Analisis Regresi Linear Berganda (Model 1)

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Dalam hal ini yaitu menganalisis pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Tabel 1 Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	7.701	2.849
	Kompetensi (K)	0.231	0.067
	Sistem Pengendalian Internal (SPI)	0.168	0.028
	Partisipasi Masyarakat (PM)	0.128	0.077

Dari data tabel untuk persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$APKD = 7,701 + 0,231_{KK} + 0,168_{SPI} + 0,128_{PM} + e$$

Nilai Konstanta constant (α) sebesar 7,701 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (Kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat) adalah nol maka kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi sebesar 8,650. Koefisien regresi variabel kompetensi (X1) sebesar 0,231 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kompetensi akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,231. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X2) sebesar 0,168 artinya bahwa peningkatan satu variabel sistem pengendalian internal dengan asumsi variabel bebas lain konstan akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,168. Koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat (X3) sebesar 0,128 artinya bahwa peningkatan satu variabel partisipasi masyarakat dengan asumsi variabel bebas lain konstan akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 0,128.

Uji Hipotesis (Uji t) Model 1

Tabel 2 Hasil Uji t Model 1

Model		Standardized Coefficients		T	Sig.
		Beta	Std. Error		
1	(Constant)	7.701	2.849	2,703	0,008
	Kompetensi (K)	0.231	0.067	3,440	0,001
	Sistem Pengendalian Internal	0.168	0.028	6,103	0,000
	Partisipasi Masyarakat	0.128	0.077	1,662	0,099

Pengujian hipotesis pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dilakukan uji t yang menghasilkan perhitungan nilai beta 0,231 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ yang artinya kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dengan demikian hipotesis pertama diterima. Pengujian hipotesis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan uji t yang menghasilkan nilai beta sebesar 0,168 dengan signifikansi 0,000. Nilai sig. $0,000 < 0,05$ artinya system pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dengan demikian hipotesis kedua diterima. Pengujian hipotesis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai signifikansi sebesar 0,099. Nilai signifikansi dari $0,099 > 0,05$ artinya partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat tidak mengalami peningkatan dan hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian pada beta sebesar 0,128.

Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis)

Salah satu metode untuk menganalisis variabel moderasi adalah regresi moderasi. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah variabel moderasi akan memperkuat atau memperlemah pengaruh independen terhadap variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 3 Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	-65.089	30.704
	Kompetensi	1.566	.708
	Sistem Pengendalian Internal	.089	.292
	Partisipasi Masyarakat	1.158	.701
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	2.328	.865
	Kompetensi*Pemanfaatan teknologi informasi	-.036	.019
	SPI*PTI	.001	.008
	PM*PTI	-.034	.020

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Dari data tabel 3 persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$APKD = -65,089 + 1,566K + 0,089 SPI + 1,158PM + 2,328PTI - 0,036K*PTI + 0,001SPI*PTI - 0,034PM*PTI + e$$

Uji Hipotesis (Uji t) Model 2

Tabel 4 Hasil Uji t Model 2

Model		Standardized Coefficients		t	Sig.
		Beta	Std. Error		
1	(Constant)	-65.089	30.704	-2.120	0.059
	Kompetensi * PTI	-0.036	0.019	-1.906	0.059
	Sistem Pengendalian Internal * PTI	0.001	0.008	0.121	0.904
	Partisipasi Masyarakat * PTI	-0.034	0.020	-1.679	0.096

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,059 > 0,05 dimana beta yang dihasilkan adalah -0.036, sehingga hipotesis keempat ditolak (H4 ditolak). Hasil uji hipotesis diketahui bahwa Pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah tidak signifikan. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,904 > 0,05 sehingga hipotesis kelima ditolak (H5 ditolak). Berdasarkan tabel 3 hasil uji hipotesis diketahui bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai signifikansi 0,096 > 0,05, dimana koefisien regresi menunjukkan pengaruh negative dari variable pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan arah negative sehingga hipotesis keenam ditolak (H6 ditolak).

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis atau uji yang telah dilakukan terkait variabel diperoleh hasil bahwa kompetensi berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di wilayah kabupaten sikka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H₁) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa yang semakin meningkat akan semakin meningkat pula akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Secara umum, meskipun kompetensi aparatur desa di Kabupaten Sikka rata-rata berpendidikan SMA tapi aparatur desa mendapatkan pelatihan yang cukup sehingga dapat meningkatkan peranan dalam masyarakat. Hasil penelitian ini didukung dengan dengan penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi dalam penelitian ini. Penelitian yang sesuai tersebut seperti Budiana *et al.* (2019), Atiningsih dan Ningtyas (2019), dan Aulia *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa maupun kompetensi aparatur pengelola dana desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis atau uji yang telah dilakukan terkait variabel diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di wilayah kabupaten sikka. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengendalian internal di suatu desa juga akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga tercapainya pengendalian internal yang baik di suatu desa. Artinya terdapat hubungan searah atas Penerapan sistem pengendalian internal dengan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan



keuangan desa. Sistem Pengendalian internal yang bertanggung jawab bagi akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena terdapat control yang baik dari dalam sehingga laporan yang disajikan ke masyarakat benar sesuai kejadian yang sebenarnya Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019), Budiana *et al.* (2019), dan Widyatama *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis di tolak atau tidak mendukung hipotesis. Hal ini mungkin disebabkan partisipasi masyarakat pada Pemerintah desa di Kabupaten Sikka belum sepenuhnya mewakili masyarakat. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis banyak aparatur desa yang masih memilih masyarakat yang mendukung mereka saja dan yang berbeda pendapat jarang diikuti sertakan dalam rapat yang diadakan oleh pemerintah desa karena dianggapakan menentang kebijakan yang dibuat oleh mereka. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlon Reu & Lasdi (2021), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan dimoderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh signifikan dalam memperkuat pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Melalui upaya ini maka kompetensi aparatur desa akan meningkat dan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tingginya tingkat kemampuan kompetensi pada aparatur desa maka akan meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sebaliknya semakin rendah kemampuan kompetensi pada aparatur desa maka akuntabilitas yang diperoleh semakin rendah. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Idrus, Emil dkk (2019) menyatakan bahwa Pemanfaatan TI memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Begitu juga yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2010), dalam penelitian menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan kemajuan teknologi informasi sangat penting untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan desa bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan dimoderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh signifikan dalam memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sebaliknya sistem pengendalian yang rendah menyebabkan akuntabilitas pengelolaan tidak tercapai. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan idrus, emil *et al* (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi atau tidak mendukung system pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Ada beberapa penyebab hal ini terjadi diantaranya kurangnya pengendalian internal dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi meliputi keabsahan, otorisasi, kelengkapan, penilaian, klasifikasi, tepat waktu dan posting yang benar. Sesuai penjelasan dari Committee of Sponsoring Organizations(COSO) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa unsur-unsur yang membentuk SPIP antara lain Lingkungan pengendalian; Penilaian resiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi; dan Pemantauan pengendalian intern. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern bahwa SPIP dilaksanakan secara menyeluruh. Oleh karena itu peran auditor internal sangat diperlukan agar dapat melakukan evaluasi pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan dimoderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan hasil penelitian dikatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh signifikan dalam memperkuat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mada *et al.*, (2017) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) yang menyatakan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat ditujukan untuk mewujudkan pelayanan kepada publik, sehingga masyarakat yang diberikan pelayanan harus ikut serta dalam menyelenggarakan pengelolaan dana desa yang lebih baik. Semakin tinggi partisipasi yang dilakukan masyarakat akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Berdasarkan rumusan masalah, pengujian hipotesis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sikka. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sikka. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak memoderasi hubungan antara kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi hubungan antara partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

REFERENSI

- Aulia, P., Agusti, R., & J. (2018). (2018). Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis)*, 1(1), 1–15.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Budiana, D. A., Said, D., & -, N. (2019). the Effect of Village Device Competencies and Internal Control System on Accountability of Village Management. *Scientific Research Journal*, VII(I), 10–20. <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i1.2019.p0119599>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. (1991). *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Idrus, E., Riharjo, I. B., & Hermanto, S. B. (2019). Pengaruh kompetensi, sistem pengendalian, rekonsiliasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah : teknologi informasi sebagai variabel moderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Alor NTT). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(9), 1–24.
- A. K. D. L., Anantawikrama Tungga Atmadja, SE, Ak., M. ., & I made pradana adiputra, S.E., S.H., M. S. . (2019). Membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan desa pakraman kubutambahan, kecamatan kubutambahan, kabupaten buleleng, provinsi bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT) UNDIKSHA*.
- Listyawati, D., Sarmiati, Dan, & Asmawi. (2019). Komunikasi Perangkat Nagari dan Partisipasi

- Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. *JISPO VOL. 9 No. 1 Edisi: Januari-Juni Tahun 2019*, 9(1), 97–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4143>
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Marlon Reu, F., & Lasdi, L. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tanawawo. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 38–59. <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.38-59>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Perdana, K. W. (2018). No Title. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul*. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23408>
- Peraturan Pemerintah Nomor 60. (2008). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. LN. 2008 No. 127, TLN No. 4890, LL SETNEG : 28 HLM.*
- Rezkiyanti, Y. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Perangkat desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 16(1), 17–24. e-jurnal.nobel.ac.id
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung : Alfabeta.*
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). No Title. *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya Dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang.*, 17, 1–18.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Wafirotin KSeptiviasuti U. (2019). The effect of transparency, community participation, and accountability on management of village funds in ponorogo regency. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 14 (1).
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (add). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.20473/baki.v2i2.4762>